

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu variabel penting dari persoalan hubungan militer dengan politik di Indonesia adalah peran militer dalam bidang politik, yaitu sejauh mana militer terlibat dalam bidang politik.¹ Berbicara mengenai hubungan militer dan politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari perspektif pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan saat itu. Setiap orde pemerintahan memberikan kadar hubungan militer dan politik yang berbeda-beda.

Pembentukan Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti tidak bisa dipisahkan dari proses penumpasan gerakan PRRI pada tahun 1958.² Pemerintah pusat bersikap represif terhadap PRRI. Ultimatum PRRI dijawab oleh pemerintah pusat dengan mengirim satuan tempur dengan nama sandi “Operasi 17 Agustus” ke Sumatera Barat.³ Operasi 17 Agustus di Sumatera Barat menjadi cikal-bakal pembentukan sebuah Satuan Komando Militer yaitu Kodam III/17 Agustus. Operasi militer Kodam III/17 Agustus ini meliputi wilayah Sumatera Barat dan

¹ Muslim Mufti, *Kekuatan Politik di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 39.

² PRRI ialah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dipelopori oleh eks Divisi IX Banteng. Bermula dari reuni eks Divisi IX Banteng dengan tokoh pembicara Ismail Lengah, Letkol Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan tokoh-tokoh tentara lainnya. Pada pertemuan-pertemuan tersebut mereka membahas tentang nasib mantan pejuang revolusi, memprotes kebijakan pusat dengan menuntut akan adanya otonomi daerah serta koreksi terhadap reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat sehingga dibubarkannya Divisi IX Banteng, tetapi pertemuan ini menghasilkan terbentuknya Dewan Banteng. Para tentara juga melibatkan pemuka masyarakat dalam lembaga tersebut, seperti kaum adat, agama, intelektual dan pemerintahan (sipil dan militer). Gerakan daerah yang dipimpin oleh Dewan Banteng mencapai klimaksnya pada tanggal 15 Februari 1958, yakni ketika diumumkan pembentukan PRRI. Lihat, Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 189.

³*Ibid.*, hal. 210.

Riau. Pada saat itu, untuk pemulihan kondisi keamanan Kodam III/17 Agustus hanya memiliki unsur satuan teritorial dan unsur satuan tempur. Sementara itu sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan parah akibat perang, sedangkan Kodam belum memiliki unsur satuan zeni. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas zeni Kodam III/17 Agustus perlu meminta bantuan kepada pasukan zeni dari Pulau Jawa terlebih dahulu untuk dikirimkan ke Pulau Sumatera.⁴

Berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat, maka Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) memberikan perintah kepada Direktur Zeni Angkatan Darat (Dirziad) untuk segera menyusun rencana pembentukan satuan bantuan tempur. Satuan bantuan tempur yang akan dibentuk berupa kesatuan Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) yang organik dibawah jajaran Kodam III/17 Agustus.

Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti yang lebih dikenal dengan sebutan Denzipur 2 ini oleh masyarakat luas, resmi didirikan pada tanggal 1 Agustus 1966.⁵ Pembentukan struktur organisasi satuan Denzipur 2/Prasada Sakti ketika itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dimana struktur organisasi yang dibentuk hanya secara garis besar diantaranya terdiri dari Komandan, Wakil Komandan, Komandan Peleton Bantuan (Danton Bantuan), Komandan Peleton I (Danton I), Komandan Peleton II (Danton II) dan Komandan Peleton III (Danton III).

⁴Lihat Rinaldo Rusdi, "Sejarah Satuan Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti Kodam I/Bukit Barisan," (Payakumbuh: Agustus 2015), hal. 2.

⁵*Ibid.*

Denzipur 2/Prasada Sakti merupakan satu-satunya Detasemen Zeni Tempur yang ada di wilayah Sumatera, sebelumnya terdapat Denzipur 1/Dhika Anoraga di Aceh namun kemudian satuan tersebut berubah menjadi satuan Yonif 16 pasca tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Penamaan satuan Denzipur 2/Prasada Sakti ini sudah ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sejak rencana proses pembentukan satuan. Prasada Sakti merupakan motto satuan Denzipur 2 yang berarti bahwa satuan Denzipur 2 adalah satuan yang tangguh dan selalu memberikan bantuan tenaga dan keahlian yang terbaik dari personilnya untuk keluhuran bangsa dan negara.⁶ Denzipur 2/Prasada Sakti merupakan salah satu satuan bantuan tempur corp zeni yang berada dibawah naungan Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad). TNI Angkatan Darat memiliki 3 cabang kesatuan yaitu satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi. Satuan tempur terdiri dari pasukan Infanteri (INF), Kavaleri (KAV), Artileri Medan (ARM) dan Artileri Pertahanan Udara (ARH). Satuan bantuan tempur terdiri dari Zeni (CZI), Penerbang (CPN), Peralatan (CPL) dan Perhubungan (CHB). Beberapa corp yang tergabung dalam satuan bantuan administrasi yaitu Polisi Militer (PM), Ajudan Jenderal (CAJ), Pembekalan Angkutan (CBA), Topografi (CTP), Kesehatan Militer (CKM), Keuangan (CKU) dan Hukum (CHK).⁷

Denzipur 2/Prasada Sakti sebagai satuan yang memiliki kemampuan dalam bidang zeni serta didukung oleh material alat berat zeni yang dimilikinya,

⁶*Ibid.*, hal. 1.

⁷Kecabangan TNI-AD, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecabangan_TNI_Angkatan_Darat, pada Minggu, 1 Mei 2016. Pukul 13.05 WIB.

maka satuan tugas sering diminta untuk melakukan pembangunan infrastruktur desa/atas kerjasama dengan pemerintah daerah maupun berdasarkan perintah dari kodam bahkan ada kegiatan tersebut berdasarkan atas inisiatif satuan untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tugas yang dilakukan seperti membuka akses jalan, melakukan pelebaran jalan maupun sungai, pemasangan jembatan bailley,⁸ jembatan gantung, pembuatan irigasi, pembangunan rumah layak huni, penanggulangan bencana alam hingga pembangunan fasilitas umum di wilayah tugas satuan itu sendiri. Seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh ABRI tersebut terancang dalam program nasional yang disebut dengan Bakti TNI.

Program Manunggal TNI-Rakyat yang dikenal dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD) mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia pada tahun 1980. Program AMD ini termasuk salah satu Operasi Bakti TNI. Akan tetapi sebelum dibentuknya program AMD tersebut, Denzipur 2/Prasada Sakti sejak awal berdirinya sudah banyak melakukan tugas Bakti TNI di beberapa daerah di Sumatera Barat maupun Riau dalam rangka kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Tugas Karya Bakti TNI yang dilakukan dapat berupa kerja sama dengan pemerintah daerah atau bahkan dilakukan atas inisiatif dari satuan itu sendiri.

⁸Jembatan Bailley merupakan alat penyeberangan standar yang dimiliki oleh TNI AD yang operasionalnya menjadi tanggung jawab Zeni AD untuk mendukung tugas, baik OMP dan OMSP. (Lihat Letkol Czi Akhmad Safuan, “Kemampuan Bengpuszi dalam Membuat Rincikan Jembatan Bailley”, dalam majalah Varia Zeni, Tahun 2012. hal. 39)

Oleh sebab itu, peran Denzipur 2/Prasada Sakti tidak bisa dilupakan dalam proses pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Ada beberapa hal tertentu yang mana dalam program AMD sangat membutuhkan tenaga pasukan zeni, misalnya pemasangan jembatan bailey, Denzipur 2/Prasada Sakti sebagai salah satu penanggung jawab operasional pemasangan jembatan tersebut. Kemudian, alat-alat berat zeni sangat dibutuhkan dalam rangka melancarkan kegiatan manunggal TNI-Rakyat, karena memadai untuk kondisi lapangan suatu wilayah terutama untuk daerah yang terkena dampak bencana alam, maka peran satuan Denzipur 2/Prasada Sakti sangat besar dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat khususnya. Sementara itu, di samping program AMD yang melibatkan tenaga masyarakat dalam mendukung pembangunan daerahnya, ada pula kegiatan Karya Bakti TNI atas inisiatif satuan atau kerjasama dengan pihak tertentu, misalnya dengan perusahaan swasta.

Pada masa Reformasi program AMD kemudian berubah nama menjadi TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Tenaga pasukan Denzipur 2/Prasada Sakti masih sangat dibutuhkan demi kelancaran program TMMD di beberapa wilayah kodim Sumatera Barat, Riau maupun di Aceh dan Sumatera Utara dalam penanggulangan bencana alam. Tahun 2012 untuk membantu kelancaran TMMD ke-88 di wilayah Kodim 0312/ Padang berdasarkan permintaan Danrem 032/Wirabraja, Dandenzipur 2 mengirimkan 33 orang personel dengan dipimpin oleh Danton Letda CZI Doni Lukman.⁹ Manunggal kali ini akan membuka jalan baru sepanjang 13,6 kilometer x 36 meter dari kawasan

⁹Surat Perintah No. Sprin 73/ V / 2012.

Bungus Teluk Kabung sampai ke kawasan Padang Besi Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan.

Kemudian, Dandenzipur 2/Prasada Sakti pada tahun itu juga mengirim pasukan untuk manunggal ke wilayah Kodim 0310/Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya yaitu di Kenagarian Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Dharmasraya. Pasukan dipimpin oleh Danton Letda CZI Eri Mardianto yang membawahi 2 regu personel,¹⁰ yang akan membantu program TMMD untuk pengerasan jalan dari Lubuk Karak ke Siraho, serta pembukaan akses jalan baru dari Lubuk Karak ke Banai sehingga masyarakat tidak lagi terkendala dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka.¹¹ Sedangkan sebanyak 25 orang personel Denzipur 2/Prasada Sakti juga ikut berperan aktif dalam membantu program TMMD ke-89 tahun 2012 di wilayah kodim 0306/ Kabupaten Lima Puluh Kota yang diadakan di Pangkalan, Mangilang dan Koto Alam.¹² Pada tahun 2014, pasukan Denzipur 2/Prasada Sakti juga dikirim untuk membantu pelaksanaan TMMD ke-92 di Tuapejat, Mentawai. TMMD kali ini disambut antusias oleh warga setempat dengan adanya bantuan tenaga dari 150 orang warga per-harinya, serta menelan dana sebesar 2,2 miliar rupiah bersumber dari APBD Mentawai dan Kodim.¹³

Pada sisi lain untuk fungsi pertahanan Denzipur 2/Prasada Sakti, sejak berdirinya satuan tugas Operasi Militer Perang (OMP) belum pernah

¹⁰Surat Perintah No. Sprin 74/ V / 2012.

¹¹"TNI Perbaiki Jalan Lubuk Karak", Haluan, edisi Kamis 30 Juni 2011, hal. 16

¹²"TMMN Ke-89 di Pusatkan di Pangkalan: Upaya Mempercepat Pembangunan", Sinamar, edisi No. 87/ XI/ 2012, hal. 3.

¹³"TMMD di Mentawai Telan Dana 2,2 Miliar", Haluan, edisi Kamis 22 Mei 2014, hal. 2.

dilaksanakan. Akan tetapi tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sudah sering dilakukan berupa kegiatan manunggal dan tugas operasi pengamanan, seperti pengiriman beberapa kali pasukan untuk membantu pasukan satuan lain ke daerah Timor Leste. Kemudian pengiriman pasukan untuk tugas Operasi Jaring Merah ke Aceh serta Operasi Pengamanan Perbatasan Atambua, NTT. Pada tahun 2013 atas perintah Danrem 032/Wirabraja, Dandenzipur 2 mengirim 3 orang personel untuk kegiatan *Timber Cruising* dan tata batas di wilayah Kodim 0319/Mentawai.¹⁴

Berdasarkan gambaran tentang tugas dan keunikannya, Denzipur 2/Prasada Sakti selain untuk fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri satuan ini juga merupakan satu-satunya Detasemen Zeni Tempur yang ada di Pulau Sumatera telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur fisik di wilayah tugasnya, khususnya Sumatera Barat melalui program-program manunggal TNI yang dilaksanakan di berbagai daerah-daerah yang tertinggal dan terisolir maupun dalam rangkaian kegiatan Bakti TNI yang dilakukan oleh satuan. Satuan Denzipur 2/Prasada Sakti selalu diikutsertakan dalam setiap program manunggal TNI-rakyat sejak masa Orde Baru hingga Reformasi pasukannya dianggap suatu unsur penting untuk menunjang kelancaran pembangunan fisik pada program manunggal tersebut. Kemudian, Denzipur 2/Prasada Sakti juga memainkan peran pentingnya dalam upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi, sebab satuan ini memiliki pasukan yang mampu bergerak cepat pada saat darurat dan memiliki keahlian untuk menggerakkan alat berat zeni dalam penanggulangan suatu bencana alam

¹⁴Surat Perintah No. Sprin /16/ I/ 2013

yang terjadi. Beberapa keunikan yang ditonjolkan oleh satuan Denzipur 2/Prasada Sakti membuat penulis tertarik mengkaji topik ini lebih mendalam untuk menambah khasanah baru dalam kajian militer serta memberikan nilai informasi kepada pembaca. Maka penelitian ini diberi judul **“Peran Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti TNI-AD dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Sumatera Barat Tahun 1966-1998”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Kajian sejarah militer yang akan diteliti untuk kelancaran penulisan skripsi ini yaitu tentang sejarah terbentuknya Denzipur 2/Prasada Sakti, perkembangan satuan itu sendiri kemudian tugas pokok dan karya baktinya terhadap pembangunan infrastruktur fisik di Sumatera Barat. Beberapa rumusan pertanyaan akan diajukan guna memudahkan penulis sebagai dasar pengembangan tulisan selanjutnya yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terbentuknya Denzipur 2/Prasada Sakti?
2. Bagaimana perkembangan organisasi dan markas satuan Denzipur 2/Prasada Sakti dalam kurun waktu 1966-2014?
3. Apa saja tugas pokok Denzipur 2/Prasada Sakti sebagai satuan zeni tempur serta perannya terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat?

Batasan temporal untuk penelitian ini yaitu antara tahun 1966 hingga tahun 2014. Batasan awal yang diambil untuk penelitian ini adalah tahun 1966, sebab pada tahun tersebut resmi berdirinya satuan Denzipur 2/Prasada Sakti yang organik pada Kodam III/17 Agustus. Pada saat itu merupakan pasca peristiwa

PRRI dan Kodam belum memiliki unsur satuan bantuan zeni tempur untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau. Denzipur 2/Prasada Sakti ini lebih identik dengan perannya dalam pembangunan infrastruktur fisik selama masa Orde Baru demi menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan negara melalui program AMD. Namun, tanpa melupakan bahwa seiring runtuhnya rezim Orde Baru yang menandakan keikutsertaan runtuhnya konsep Dwifungsi ABRI sebagai salah satu dasar bagi lahirnya program AMD dan tuntutan zaman agar militer harus kembali ke barak, maka penulis akan mengambil batasan akhir dari penelitian ini yakni tahun 2014. Hal ini dikarenakan program manunggal TNI-Rakyat pada tahun 2004 kembali dilaksanakan. Program TMMD merupakan kelanjutan program AMD pada masa rezim Orde Baru dan program tersebut tidak dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan demi kemajuan pembangunan di Indonesia, khususnya Sumatera Barat karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan daerahnya. Program TMMD pada tahun 2014 di Sumatera Barat cukup menuai antusiasme masyarakat Tua Pejat, Mentawai untuk ikut serta dalam memajukan pembangunan daerahnya melalui program TMMD yang dilakukan oleh TNI bersama pemerintah. Artinya, Denzipur 2/ Prasada Sakti hingga saat ini masih aktif dalam program manunggal TNI-Rakyat di Sumatera Barat.

Batasan spasial yang diambil dalam penelitian ini ialah Sumatera Barat, sebab lebih banyak tugas karya bakti berupa manunggal ataupun Bakti TNI lainnya berlangsung di Sumatera Barat dan beberapa di daerah Riau. Denzipur 2/Prasada Sakti sebagai salah satu satuan zeni dibawah jajaran Kodam I/Bukit

Barisan memiliki alat-alat berat zeni yang dapat menunjang kelancaran program manunggal yang diadakan oleh kodim yang tersebar di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Setidaknya satu regu personil Denzipur 2/Prasada Sakti selalu dibutuhkan dalam setiap program manunggal, satuan ini sangat berperan penting dalam menunjang kemajuan pembangunan di Sumatera Barat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan pertanyaan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses terbentuknya Denzipur 2/Prasada Sakti.
2. Mendeskripsikan perkembangan organisasi dan markas satuan Denzipur 2/Prasada Sakti dalam kurun waktu 1966 hingga 2014.
3. Menjabarkan apa saja tugas pokok Denzipur 2/Prasada Sakti sebagai satuan zeni yang telah dilaksanakan dan peranannya terhadap pembangunan infrastruktur fisik di Sumatera Barat.

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan nilai informatif kepada pembaca bahwa satuan Denzipur 2/Prasada Sakti telah memberikan peran pentingnya dalam pembangunan infrastruktur fisik dan upaya penanggulangan bencana alam yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Selain bernilai informatif, tulisan ini diharapkan dapat menjadi khasanah baru dalam kajian sejarah militer.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya yang menyangkut kajian sejarah militer ini yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bukti bahwa karya tersebut memberikan ragam baru bagi kajian sejarah militer itu sendiri, diantaranya: buku yang berjudul “*Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)*”¹⁵ karya Saleh As’ad Djamhari, yang menjelaskan tentang terbentuknya ABRI berikut perkembangannya disetiap periode pemerintahan dan tugas operasi militernya sebagai angkatan bersenjata dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. Pada karyanya ini Saleh As’ad Djamhari juga menjelaskan usaha ABRI dalam mengatasi Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) serta menjelaskan tentang peran ABRI dalam mengemban Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Karya yang berjudul “*Sejarah TNI*” yang terdiri dari jilid I, II, III, IV dan V”¹⁶ yang diterbitkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI yang berisi tentang bagaimana perkembangan TNI serta unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam tubuh TNI itu sendiri. Buku karya Jendral A.H. Nasution yang berjudul, “*Tentara Nasional Indonesia*”¹⁷ yang menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta berbagai kejadian yang menyangkut angkatan bersenjata.

¹⁵Saleh As’ad Djamhari, *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)*, (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995).

¹⁶Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI*, (Jakarta, 2000).

¹⁷A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, (Jakarta: Seruling Masa, 1970).

Selanjutnya hasil karya Saurip Kardi yang berjudul “*TNI dahulu, sekarang dan masa depan*”¹⁸ berisi tentang TNI pada masa Orde Baru, reformasi internal dalam tubuh TNI, rekonsiliasi nasional juga menuangkan visi misi TNI untuk masa mendatang yaitu dituntut adanya profesionalisme prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya. Buku yang berjudul “*Dwifungsi ABRI:Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*” karya Bilver Singh yang berisikan tentang doktrin Dwifungsi ABRI yang berkembang selama Orde Baru dan pengaruh militer dalam bidang sosial politik masa itu. Kemudian, Bilveer Singh membahas tentang peran militer secara umum dalam masyarakat serta mengulas berbagai argumen yang mengkritik konsep Dwifungsi ABRI dan impelmentasinya dalam pemerintahan.¹⁹

Selanjutnya, sebuah karya Arif Yulianto yang berjudul “*Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba: di Tengah Pusaran Demokrasi*”. Arif Yulianto mengambil titik tolak hubungan sipil dan militer ini dari masa Orde Lama dan Orde Baru, kemudian membahas dinamika peran militer pasca Orde Baru. Eksistensi institusi militer yang begitu kuat memberi dampak pemerintahan sipil relatif tidak mampu mengontrol militer secara objektif. Arif Yulianto dalam konteks ini menggunakan model pendekatan dua dimensi yakni kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer.²⁰

¹⁸Saurip Kardi, *TNI dahulu, sekarang dan masa depan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000).

¹⁹Bilver Singh, *Dwifungsi ABRI Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).

²⁰Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002).

Kemudian, Ahmad Yani Basuki dalam bukunya yang berjudul *“Reformasi TNI, Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat: Kajian Historis di Masa Krisis 1998-2007”* membahas tentang paradigma baru TNI yang disertai oleh reformasi internal dan eksternal TNI yang merupakan hasil tuntutan dari dihapuskannya Dwifungsi ABRI setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Selain itu, Arif Yulianto dalam karyanya ini juga mengulas tentang pola dan profesionalitas TNI, refungsionalisasi peran TNI, serta pandangan pers terhadap adanya reformasi di tubuh TNI tersebut.²¹

Buku karya Mestika Zed, *“Giyugun Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatra”*²² dalam buku ini penulisnya bermaksud untuk menelusuri lebih dalam sejarah cikal bakal militer Indonesia modern khususnya yang memiliki kaitan dengan kelompok Giyugun Sumatera. Mestika Zed menjelaskan pula proses lahirnya TNI wilayah Sumatera yang awalnya merupakan kelompok Giyugun.

Sedangkan untuk kajian sejarah militer yang spesifik mengenai satuan komando tertentu yang ada di Sumatera Barat diantaranya ialah Skripsi Huda Yasri dengan judul *“Kodam III/17 Agustus di Sumatera Barat 1959-1963”*²³ menjelaskan sejarah terbentuknya Kodam III/17 Agustus, wilayah tugasnya maupun unsur-unsur yang ada di jajaran Komando Daerah Militer tersebut. Huda Yasri juga menjelaskan usaha Kodam dalam membangkitkan lagi

²¹Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI, Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat: Kajian Historis di Masa Krisis 1998-2007*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

²²Mestika Zed, *Giyugun Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatra*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005).

²³Huda Yasri, *“Kodam III/17 Agustus di Sumatera Barat 1959-1963”*, Skripsi, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1990).

kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca peristiwa PRRI. Skripsi Muhammad Fauzan “*Dinamika Korem 032/Wirabraja dan Hubungan Sosialnya dengan Masyarakat Sumatera Barat 1984-2009*”²⁴ yang mana dalam karya ini menjelaskan bagaimana perkembangan Korem 032/Wirabraja dari awal berdirinya serta rantai komando yang berada dibawah komando Korem itu sendiri dan hubungan sosial masyarakat terutama pasca gempa tahun 2009 di Sumatera Barat. Kemudian, jurnal Komandan Denzipur 2/Prasada Sakti Rinaldo Rusdy yang berjudul “*Sejarah Satuan Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti, Kodam I/Bukit Barisan*”²⁵ berisi tentang sejarah singkat satuan Denzipur 2/PS serta kondisi awal satuannya saja, sedangkan tentang perkembangan dan tugas satuan hanya dijelaskan secara umum dan tidak terperinci.

E. Kerangka Analisis

Secara garis besar penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah militer. Sejarah militer merupakan penulisan sejarah yang mengkaji tentang segala sesuatu yang menyangkut tugas maupun aktivitas kelompok angkatan bersenjata yang berfungsi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Militer bertugas untuk menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan pada suatu negara apabila terjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun, tidak jarang pada suatu negara kelompok

²⁴Muhammad Fauzan, “*Dinamika Korem 032 /Wirabraja dan Hubungan Sosialnya dengan Masyarakat Sumatera Barat 1984-2009*”, Skripsi, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2014).

²⁵Rinaldo Rusdy, “*Sejarah Satuan Detasemen Zeni Tempur 2/Prasada Sakti, Kodam I/Bukit Barisan,*” (Padang, 2015).

militer terlibat dalam urusan-urusan politik suatu negara. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa otoritas sipil berada dibawah bayang-bayang militer.²⁶

Akibat adanya intervensi ke dalam kehidupan politik, Amos Pelmuter mengelompokkan tiga jenis militer. Pertama, militer profesional, yaitu jenis militer yang memiliki keahlian yang terspesialisasi dalam bidang kemiliteran dari sudut pandang pengetahuan dan keahliannya. Keahlian tersebut berkadar tinggi dan berstandar keprofesionalan. Ideologi yang dipegan oleh militer jenis ini adalah bersifat konservatis dan kecenderungan untuk campur tangan terhadap politik sipil sangat rendah.²⁷

Kedua, militer pretorian, yaitu jenis militer yang keahlian dan pengetahuan kemiliterannya tidak terspesialisasikan. Orientasinya mengarah pada pengabdian masyarakat dan negara secara bersamaan melalui kelompok politik dominan, suku atau klik militer dan grup primordial. Militer jenis ini cenderung untuk melakukan intervensi yang bersifat permanen atau berkelanjutan.²⁸

Ketiga, militer revolusioner, yaitu jenis militer yang memiliki keahlian dan pengetahuan profesional yang ditujukan pada nilai-nilai sosial dan politik. Di Indonesia militer jenis ini disebut juga “tentara pejuang”. Orientasi dari militer ini bersifat pergerakan perjuangan kemerdekaan. Kemudian, tingkat intervensi terhadap politik pra dan selama revolusi itu tinggi, akan tetapi pada masa revolusi cenderung rendah.²⁹

²⁶Muslim Mufti, *op. cit.*, hal. 33.

²⁷*Ibid.*, hal. 41.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

Keadaan militer pada beberapa negara berkembang hampir memiliki sejarah perjalanan yang sama. Pada masa awal perjuangan sampai beberapa kurun waktu setelah kemerdekaan, posisi dan peran militer sangat dominan dalam pengendalian perjalanan bangsa tersebut. Para politisi militer pada umumnya tidak mampu menciptakan organisasi-organisasi politik atau lembaga politik yang efektif. Edward Fiet memberi contoh beberapa pemimpin militer seperti Ayub Khan di Pakistan, Ne Win di Burma, Gamal Abdul Nasser di Mesir dan Primo De Rivera di Spanyol, yang semuanya memiliki periode memerintah yang cukup panjang namun tidak berhasil membangun lembaga-lembaga politik yang tahan lama. Kemudian, Herowitz memberikan contoh kegagalan tentara Mesir yang disebabkan oleh perluasan peran politik angkatan bersenjata negara tersebut. Gamal Abdul Nasser telah mengalihkan sekitar 300 orang perwira senior angkatan bersenjata ke dalam jabatan-jabatan sipil.³⁰

R.J. May dan Viberto Selochan mengungkapkan bahwa ada upaya-upaya pelembagaan militer dalam politik di kawasan negara-negara Asia Pasifik, seperti di Birma, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, Papua Nugini dan termasuk Indonesia pada masa pra Reformasi. Di Thailand selama 64 tahun, militer di negeri ini menjadi kekuatan yang berperan penting dalam kehidupan negaranya bahkan telah 23 kali melakukan kudeta. Selanjutnya, di Birma, atas permintaan Perdana Menteri U. Nu tahun 1958 meminta militer membantu pemerintahan disaat pemerintahan tersebut mengalami kekacauan. Di Filipina

³⁰Ahmad Yani Basuki, *op.cit.*, hal. 47-48.

militer ikut berperan melengserkan Presiden Marcos melalui gerakan “*People Power*”.³¹

Lahirnya peran politik militer Indonesia tidak terlepas dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda di mana fungsi militer dan politik tidak mempunyai batasan yang jelas, bahkan kedua fungsi tersebut berjalan bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan. Sifat perjuangan itu sendiri bersifat politik akan tetapi juga bersifat militer.³² Kemelut politik yang berkepanjangan pada masa Orde Lama membuat militer merasa berhak untuk turun ke ranah politik, sehingga muncullah suatu masa di mana pemerintahan diambil alih oleh militer yakni masa Orde Baru.

Pada rezim Orde Baru hubungan antara militer dan politik sangat kentara terlihat. Jendral A.H Nasution memaknai konsep “jalan tengah” sebagai militer yang merupakan salah satu kekuatan politik di parlemen. Namun, selama rezim Orde Baru berlangsung dalam makna yang telah terdistorsi, khususnya interpretasi terhadap fungsi sosial politik ABRI dibawah pimpinan Soeharto, dilaksanakan sebagai alat bagi rezim Orde Baru.³³ Konsep ini disebut dengan Dwifungsi ABRI, maksudnya ialah ABRI tidak hanya memainkan fungsinya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga terjun dalam ranah sosial politik.

Menurut Hugh Hanning yang tertuang dalam buku Muslim Mufti yang berjudul “*Kekuatan Politik di Indonesia*” mengatakan bahwa fungsi sosial dari angkatan bersenjata itu timbul sebagai akibat terhadap keperluan, kepentingan dan tuntutan-tuntutan pembangunan serta keamanan negara yang

³¹*Ibid.*, hal. 49-52.

³²Arif Yulianto, *op.cit.*, hal. 215.

³³Muslim Mufti, *op. cit.*, hal. 87.

bersangkutan.³⁴Berdasarkan penekanan ideologis Orde Baru, kabinet Soeharto dinamakan kabinet “pembangunan”. Angkatan Darat tidak hanya menyebut dirinya sebagai “stabilisator” tetapi juga menyebut diri sebagai “dinamisator” dan merasa dibutuhkan untuk tugas itu agar dapat memainkan peranan penting di bidang ekonomi.³⁵Ulf Sundhaussen mengungkapkan pula alasan peran militer dalam politik di Indonesia, yang pertama yaitu menyangkut kepentingan internal kelompok militer itu sendiri. Kedua, akibat kegagalan sistem politik yang dikelola oleh politisi sipil.³⁶Akibatnya tugas utama tentara dalam bidang pertahanan dan keamanan bergeser ke bidang politik praktis.³⁷Selain itu militer berhasil dalam membangun basis legitimasi melalui proyek kemanunggalan ABRI-Rakyat.³⁸

Kemanunggalan ABRI-Rakyat bercermin kepada setiap prajurit TNI yang terikat dengan Sumpah Prajurit atau Sapta Marga yang membentuk kepribadian ksatria dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dari TNI.³⁹Selain Sapta Marga, hal tersebut sudah diatur pula dalam Delapan Wajib ABRI serta Tujuh Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI.

Sasaran utamanya ialah integrasi ABRI yang memenuhi beberapa syarat dan ciri-ciri salah satunya ialah politis merupakan satu kekuatan yang kompak dalam fungsi kekerayaannya sebagai kekuatan sosial.⁴⁰Melihat banyaknya tugas kekerayaan personel Denzipur 2/Prasada Sakti untuk kemajuan bangsa dan negara,

³⁴*Ibid.*

³⁵Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 308.

³⁶Muslim Mufti, *op. cit.*, hal 33.

³⁷Saurip Kadi, *op. cit.*, hal. 7.

³⁸Muslim Mufti, *op.cit.*, hal. 93.

³⁹Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI, Jilid II(1950-1959)*, (Jakarta, 2000), hal. 135-136.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 136.

khususnya Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah tugasnya dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari doktrin Dwifungsi ABRI dengan memanfaatkan militer sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Legitimasi kekuasaan dilakukan secara halus kepada masyarakat melalui program manunggal ABRI-Rakyat dalam rangka kemajuan dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Meskipun demikian, Bilveer Singh dalam bukunya yang berjudul “*Dwifungsi ABRI Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*” menyatakan bahwa Dwifungsi ABRI ada pendukung dan penentangya.⁴¹ Kelompok penentang Dwifungsi ABRI ini lebih dominan dari kalangan sipil. Masyarakat sipil pun merasa bahwa praktek kekaryaan ABRI mengurangi kesempatan dan menghalangi perencanaan karier orang-orang sipil.⁴² Penentang doktrin tersebut juga dari kalangan TNI, Jendral A.H. Nasution sendiri sebagai pencetus ideologi politik militer menuntut harus adanya pemurnian makna implementasi konsep dwifungsi, beliau juga mengkritik hubungan ABRI dengan partai-partai politik serta mengkritik partisipasi ABRI dalam bidang non-militer yang terus meningkat.

Kemudian, dalam Makalah SESKOAD yang ditulis beberapa kali dalam perdebatan elit TNI tentang Dwifungsi ABRI, bahwa perlu adanya koreksi dan peninjauan konsep Dwifungsi ABRI kembali dalam implementasinya selama Orde Baru. Namun, dalam menanggapi kritikan-kritikan tersebut, Presiden membela kedekatan ABRI dengan Golongan Karya, menegaskan bahwa sejak

⁴¹Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).

⁴²*Ibid.*, hal. 152.

awal ABRI telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan.⁴³ Maka jelaslah pada periode ini hubungan militer dan politik bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, misalnya militer memiliki dua fungsi sekaligus yakni fungsi kemiliteran (pertahanan) pada satu sisi dan fungsi kekaryaan pada sisi lain.⁴⁴

Setelah runtuhnya rezim militer Orde Baru kegiatan ini terhenti sejenak sebab konsep Dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa awal reformasi. Militer tidak lagi aktif dalam perputaran politik tapi dapat membantu sipil dalam mendukung pembangunan daerah yaitu melalui program yang dinamakan dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD merupakan kelanjutan program AMD pada masa Orde Baru.

Pada dasarnya capaian dari program manunggal yang sudah dimulai sejak Orde Baru hingga Reformasi itu sebenarnya sama yaitu untuk melakukan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik, kendati pun pada masa Orde Baru pemerintah menjadikan militer sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dalam program manunggal tersebut. Namun, sejatinya program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Definisi infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur sendiri

⁴³*Ibid.*, hal. 145-175.

⁴⁴Muslim Mufti, *op. cit.*, hal 39.

dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.⁴⁵

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014 Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara bagian D nomor urut 8, bahwa program Operasi Bakti TNI ditujukan untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Kemanusiaan dan Bakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas dalam negeri yang dilakukan dengan kegiatan pokok antara lain:

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana ibadah, prasarana kesehatan, pasar, rumah penduduk dan lain sebagainya.
- 2) Membantu program pemerintah dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya.
- 3) Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan bidang kesejahteraan rakyat, kesehatan, hukum dan HAM serta yang lainnya sesuai kebutuhan daerah sasaran.⁴⁶

TMMD merupakan salah satu program daerah yang dipadukan dengan program lintas sektoral di pusat maupun di daerah, sebagai bagian kepedulian TNI

⁴⁵Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur>, pada tanggal 21 Februari 2017, pukul 9.45 WIB.

⁴⁶Lampiran Keputusan PJO TMMD Nomor Skep /01/ XII/2009, Tanggal 7 Desember 2009 tentang Rencana Umum TMMD TA. 2010.

dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga tercipta dan terbina kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka ketahanan nasional.⁴⁷ TMMD melibatkan banyak lembaga pemerintah ataupun lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya guna mengakselerasi pembangunan di daerah-daerah, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Berkaitan dengan konsep di atas, penelitian ini membahas TNI dan perannya terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, fokusnya pada Denzipur 2/Prasada Sakti yang pada dasarnya merupakan satuan zeni tempur di bawah komando Kodam III/17 Agustus. Kemudian setelah adanya reorganisasi TNI-AD atas perintah Kasad dalam operasi perintah No. 1/1984 tanggal 22 September 1984 maka Denzipur 2/Prasada Sakti yang pada mulanya bagian dari Kodam III/17 Agustus karena adanya likuidasi komando pengendalian dalam rangka mengurangi jumlah Kodam, akhirnya sejak tahun 1984 Denzipur 2/Prasada Sakti berada di bawah komando Kodam I/Bukit Barisan.⁴⁸

Pasca operasi penumpasan gerakan PRRI, Operasi 17 Agustus yang dilakukan di Sumatera Barat menjadi cikal-bakal terbentuknya satuan Kodam III/17 Agustus. Akan tetapi, saat itu Kodam III/17 Agustus belum memiliki satuan tempur cabang zeni. Zeni sebagai salah satu kecabangan di dalam TNI AD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi teknis militer zeni, baik di daerah pertempuran maupun daerah pangkalan, sehingga satuan zeni Angkatan Darat

⁴⁷Petunjuk Pelaksanaan Pencapaian fisik TMMD TA. 2009.

⁴⁸Muhammad Fauzan, *op. cit.*, hal. 2.

dapat diklasifikasikan satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi. Kemudian, atas Surat Keputusan Ditziad No. Skep/74/V/1966 resmi didirikan Denzipur 2/Prasada Sakti dengan perannya sebagai Satuan Bantuan Tempur di jajaran Kodam III/17 Agustus dengan tugas melaksanakan konstruksi, destruksi, dan nuklir pasif guna memperbesar daya gerak satuan-satuan sendiri, memperkecil daya gerak musuh serta membantu kelangsungan hidup dan mempertinggi kemampuan operasi satuan manuver Kodam.⁴⁹ Berdasarkan tugas pokok tersebut, Denzipur 2/Prasada Sakti di masa damai sangat berperan dalam memajukan pembangunan melalui Opera Bakti TNI dan program pemerintah yakni manunggal TNI-rakyat. Sedangkan, tugas pertahanan dan keamanan Denzipur 2/Prasada Sakti pernah beberapa kali dikirim secara berturut-turut dalam operasi pengamanan di Timor Leste, Operasi Jaring Merah di Aceh, serta pengamanan di perbatasan NTT, pengiriman pasukan baik setingkat peleton, kompi, maupun setingkat peleton pioneer amunisi.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Proses penelitian ini berlangsung berdasarkan beberapa metode sejarah yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah pada umumnya. Metode sejarah terdiri atas beberapa tahapan diantaranya yaitu heuristik (pengumpulan sumber atau data), kritik, interpretasi dan historiografi (penulisan).⁵⁰ Heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber atau data yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas.

⁴⁹Profil Denzipur 2/PS, diakses dari <https://denzipur2ps.wordpress.com/> pada Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 08.30 WIB.

⁵⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Pers, 1985), hal. 50.

Sumber dalam metode sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang langsung berhubungan dengan topik penelitian dapat berupa arsip-arsip, catatan harian, jurnal, foto-foto maupun monumen dan hasil wawancara. Kemudian, pada sumber primer ini ada dua sifat sumber yaitu sumber tertulis dan sumber lisan yang dapat diperoleh dari wawancara, hal ini bertujuan untuk melengkapi data yang belum ada dan dapat mendukung data yang telah ada.

Pada penelitian ini, penulis memperoleh sumber primer yaitu arsip tertulis berupa surat perintah pengiriman pasukan, surat perintah pemindahan pasukan, surat tanah, jurnal Denzipur 2, laporan-laporan kegiatan manunggal, serta foto-foto kegiatan satuan berupa Operasi Bakti TNI, foto kegiatan manunggal, foto aksi penanggulangan bencana alam. Arsip-arsip tersebut penulis dapatkan dengan melakukan penelitian di markas satuan Denzipur 2/Prasada Sakti, di markas Korem 032/Wirabraja, di markas Kodim 0306/Lima Puluh Kota, di Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padang. Selanjutnya, untuk mendukung arsip tertulis, penulis melakukan wawancara kepada beberapa purnawirawan yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Denzipur 2/Prasada Sakti sejak pasca PRRI dan masa Orde Baru. Penulis juga mewawancarai beberapa personil aktif yang terlibat dalam kegiatan manunggal TNI-rakyat sejak masa Orde Baru hingga reformasi serta satu orang perwira menengah dari Kodim 0306, satu orang Perwira Seksi/Bakti TNI (Pasi/Bakti TNI) Korem 032/Wirabraja dan satu orang Perwira Seksi Personalia dan Logistik (Pasi/Perslog) Denzipur

2/Prasada Sakti. Kemudian, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat di daerah sasaran manunggal TNI-rakyat di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dan salah seorang masyarakat daerah sasaran Operasi Bakti TNI di Nagari Talang Maua, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar markas satuan yang melihat perkembangan pangkalan satuan dan berinteraksi langsung dengan para personil Denzipur 2/Prasada Sakti.

Memperkuat sumber primer yang telah ada, maka diperlukan pula dilakukan studi pustaka dengan mencari buku-buku, makalah, surat kabar ataupun skripsi sebagai referensi topik penelitian ini di ruang baca Denzipur 2/Prasada Sakti, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, serta kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

Tahap kedua dari metode sejarah adalah kritik. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.⁵¹Kritik sumber ini ada dua jenis yaitu kritik internal (isi sumber) dan kritik eksternal (bahan materi sumber).Beberapa arsip yang penulis dapatkan ialah arsip-arsip lama yang mana kondisi kertas arsip tersebut tidak terlalu baik lagi. Kemudian data-data yang telah dikritik akan diinterpretasikan guna menemukan hubungan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Setelah dilakukan interpretasi terhadap suatu data atau sumber maka barulah peneliti memasuki tahap akhir dari metode sejarah yaitu penulisan, disebut juga tahap historiografi.

G. Sistematika Penulisan

⁵¹Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam beberapa bab, setiap bab akan terdiri pula dari beberapa sub bab agar memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai topik penelitian ini. Namun, tidak akan mengurangi keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

BAB I merupakan awal dari penulisan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum tentang peristiwa PRRI dan pengaruh PRRI di Sumatera Barat serta sejarah terbentuknya Denzipur 2/Prasada Sakti yang akan terdiridari beberapa sub bab yang akan menjelaskan tentang kondisi awal satuan.

BAB III membahas gambaran Denzipur 2/Prasada Sakti sejak dimulainya Orde Baru. Pada bab ini akan dijelaskan tentang perkembangan organisasi satuan dan perkembangan pangkalan satuan.

BAB IV gambaran umum implementasi konsep Dwifungsi ABRI dalam bentuk tugas ABRI Masuk Desa (AMD). Pada bab ini akan dibahas tugas Karya Bakti TNI satuan Denzipur 2/Prasada Sakti dan tugas pokok Denzipur 2/Prasada dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain itu pada sub bab pertama akan dijelaskan tentang keterlibatan personil Denzipur 2/Prasada Sakti pada AMD pada masa Orde Baru. Pada sub bab kedua akan dibahas peran satuan Denzipur 2/Prasada Sakti dalam kegiatan TMMD pada masa Reformasi.

BAB V merupakan kesimpulan yang berisikan keseluruhan uraian dari setiap bab sebelumnya sebagai bentuk hasil penelitian.

